Adakah Tuhan di Pengadilan?

Isakh Benyamin Manubulu

Program Studi Doktor Filsafat, Universitas Gadjah Mada and isakhbenyaminmanubulu@gmail.com

ABSTRAK

Menyatakan kehadiran Tuhan melalui sebuah enigma “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” menyiratkan sebuah kesan terhadap keputusan Tuhan yang turut telah dipertimbangkan pada setiap putusan pengadilan. Menelusuri serangkaian peristiwa kemudian memunculkan sebuah ide tentang “*Adakah Tuhan di Pengadilan?*” untuk menelaah pada 2 (dua) rumusan masalah yakni (1) Apakah Tuhan eksis di Pengadilan? (2) Bagaimana wujud keberadaan Tuhan di Pengadilan? Yang bertujuan untuk (1) Menguraikan benar/tidaknya kehadiran Tuhan di Pengadilan sedangkan (2) Wujud dari keberadaan Tuhan di Pengadilan. Disusun dalam metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan analisis dan pendekatan konseptual yang dikombinasikan dengan metode kritis konstruktif maka analisis ini menghasilkan sebuah *softscience* bahwa (1) Tuhan eksis di Pengadilan; (2) Tuhan mengambil wujud sebagai udara di Pengadilan.

Kata Kunci: *Pengadilan, Tuhan, Enigma, Epiktolisme dan Udara.*

ABSTRACT

Stating God's presence through an enigma “for the sake of justice based on the almighty God” implies an impression of God's decision that has also been considered in every court decision. Tracing a series of events then gave rise to an idea about “Is God in Court” to examine 2 (two) problem formulations, namely (1) Does God exist in Court? (2) How is the form of God's existence in Court? Which aims to (1) describe the actual/absence of God in the Court while (2) describe the form of God's existence in the Court. Compiled in normative legal writing method with a analytical approach and conceptual approach combined with constructive critical method, this analysis produces a science that (1) God exists in Court; (2) God takes form as air in Court.

Keywords: *The Court, God, Enigma, Epiktolism and Air.*

PENDAHULUAN

Manusia selalu melakukan pencarian tentang keberadaan dari Tuhan sebab mereka meyakini bahwa keadilan merupakan hakikat dari sifat keilahian Allah.¹ Hakikat Allah yang adil ditemukan dalam QS Ali Imrān 3 : 18^{2,3}, Rigveda 1.50.1^{4,5}, ajaran Trikaya Budha Mahayana⁶, Lunyu,

¹ Dalam tulisannya, Djoko menjelaskan bahwa memahami maksud dari kebenaran absolut dan tidak terbantahkan (suara Allah) dapat ditemukan dalam Firman Tuhan yang tertuang dalam Alkitab. Lihat dalam Djoko Sukono, ‘Alkitab: Pernyataan Allah Yang Diilhamkan’, *PASCA : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15.1 (2019), pp. 28–34, doi:10.46494/psc.v15i1.66.

² Idah Suaidah, ‘KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR’AN’, *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2025), pp. 48–55, doi:10.59638/ash.v11i1.1608.

³ Lih. Muh Asroruddin al Jumhuri and Putri Marta Nitalia, ‘Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9.1 (2024), pp. 105–10, doi:10.29303/jkh.v9i1.186.

⁴ www.wisdomlib.org, ‘Rig Veda 1.50.1 [English Translation]’, 27 August 2021 <<https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/rig-veda-english-translation/d/doc829501.html>>.

⁵ ‘Memahami Ajaran Sanatana Dharma’ <<https://kemenag.go.id/hindu/memahami-ajaran-sanatana-dharma-zj4887>> [accessed 25 March 2025].

⁶ NIM 06520009 ACHMAD MUZAKI, ‘KONSEP TRIKAYA DALAM AGAMA BUDDHA MAHAYANA (Studi Tentang Ketuhanan)’ (unpublished skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, 2013) <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10329/>>.

Bab IV⁷ begitu juga dengan kepercayaan Kristen yang meyakini bahwa Hakikat Allah adalah Adil.⁸ Hal inilah yang cenderung membuat sebagian besar pihak kemudian menggunakan nama “Tuhan” untuk mendapatkan rekognisi terhadap setiap keputusan yang dibuat. *Enigma* dalam Putusan Hakim yang mencantumkan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam setiap putusannya⁹ nampaknya merupakan sebuah “komitmen suci” dari seorang hakim bahwa *irah-irah* Putusan yang dihasilkan adalah sebuah pertimbangan yang matang sebagai seorang wakil Tuhan.^{10,11} Konsepsi tentang hakim adalah wakil Allah di Pengadilan oleh karena penggunaan kata “Ketuhanan” yang melekat padanya juga telah menjadi sebuah tradisi dalam penyusunan *Petitum Subsidair* “*ex aequo et bono*” sebagai legitimasi tentang keyakinan dari seorang hakim dalam mengambil sebuah putusan. Anggapan ini kemudian menciptakan sebuah superioritas dalam sebuah lembaga, menciptakan kesan miring yang mencederai prinsip-prinsip kesetaraan. Keadaan demikian memunculkan sebuah fenomena hermeneutis¹² tentang maksud sebenarnya dari kata “Tuhan” yang layak dipahami dalam sebuah Putusan Pengadilan.

Lebih lanjut, konsepsi tentang keberadaan Tuhan di Pengadilan menjadi sebuah pembahasan yang menarik sebab ukuran Tuhan yang transenden dan imamen pada Pengadilan berbeda dengan konsep ketuhanan secara teologis.¹³ Ini dikarenakan hukum bergerak dalam sebuah pemikiran positifisme logis yang telah menetapkan sebuah standar bahasa (ukuran) terhadap sesuatu yang dikatakan “benar dan adil”. Bahasa standar ini meliputi sebuah kalimat (*sentences*), pernyataan (*statement*)¹⁴ dan preposisi (penentuan).¹⁵ Standar bahasa tersebut kemudian diformulasikan dalam 3 (tiga) level yakni Level I kalimat (*sentences*) yang merupakan sebuah bentuk penggabungan kata semata, level II yakni pernyataan (*statement*) kalimat indikatif yang telah diidentifikasi terdapat sebuah makna sekalipun makna tersebut diperhadapkan pada sebuah kondisi “*meaningfull* atau *meaningless*” sedangkan level ke III yakni preposisi sebagai kulminasi/puncak dari kedua level tersebut. Preposisi inilah yang kemudian disebut dengan Putusan Hakim.¹⁶ Positifisme logis muncul dari pemikiran positifisme klasis Aguste Comte¹⁷ yang

⁷ ‘Lun Yu’ <<https://khonghucu.tripod.com/kitab/lunyu.htm>> [accessed 25 March 2025].

⁸ Sukono, ‘Alkitab’.

⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” SEBUAH JANJI HAKIM PADA SANG PENCIPTA - Opinion | University of Muhammadiyah Malang’, <https://www.umm.ac.id/en/Opini/Demi-Keadilan-Berdasarkan-Ketuhanan-Yang-Maha-Esa-Sebuah-Janji-Hakim-Pada-Sang-Pencipta.Html> <<https://www.umm.ac.id/en/Opini/demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa-sebuah-janji-hakim-pada-sang-pencipta.html>> [accessed 25 March 2025].

¹¹ ‘Hakim : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama’ <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/hakim-demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa>> [accessed 25 March 2025].

¹² Lihat maksud fenomena hermeneutis yang dijelaskan sebagai sebuah bentuk komunikasi manusia dengan pengalaman dalam Mukalam Mukalam and Siti Murtiningsih, ‘Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer sebagai Basis Ontologis Multikulturalisme’, *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7.1 (2021), pp. 86–100, doi:10.30738/sosio.v7i1.9062.

¹³ Dialog tentang Tuhan di Pengadilan tidak dapat dikaji *apple to apple* dengan Tuhan secara transenden dan imamen.

¹⁴ Lebih umum dikenal dengan kalimat indikatif.

¹⁵ *PHILOTALK - Apa Itu Positivisme Logis?*, dir. by Kanal Pengetahuan Fakultas Filsafat UGM, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=xd_zhPI9lNw>.

¹⁶ Digaris bawah oleh Penulis.

¹⁷ Maksud dari positifisme klasik ialah keberadaan dari hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan manusia (pengetahuan) sehingga pada akhirnya pengetahuan tersebut menjadi kekuatan (*knowledge is power*)

kemudian membagi peradaban manusia ke dalam 3 (tiga) peradaban yakni teologis (*teolog adalah pembentuk hukum*), metafisika (*filosof adalah pembentuk hukum*) serta positif (*ilmuan adalah pembentuk hukum*).¹⁸

Kasus yang merujuk tentang keberadaan Tuhan di Pengadilan ditemukan dalam beberapa tulisan seperti halnya Wibisana yang menilai pengadilan di Indonesia tidak konsisten mencerminkan pembelaan Tuhan¹⁹, hakim hanyalah manusia biasa²⁰, hakim tetap membutuhkan dukungan²¹. Lebih lanjut, kasus David Ibn Shosan yang menggugat Tuhan di Pengadilan^{22,23}, Betty Panrose²⁴ melalui Kuasa Hukum Russel T. Tansie pada tahun 1970 menggugat Tuhan untuk mendapatkan ganti rugi sebesar USD100.000²⁵ yang kemudian dimenangkan oleh Panrose dengan putusan *verzet* sebab Tuhan tidak hadir di Pengadilan, Ernie Chambers atas kelalain Tuhan menghentikan terorisme sehingga pada Agustus 2008,²⁶ hakim Pengadilan Distrik Douglas County Marlon Polk menolak gugatan tersebut sebab alamat domisili Tuhan tidak terdaftar,²⁷ Pavel pada tahun 2005 menggugat Gereja Ortodox Rumania sebagai perwakilan Tuhan karena gagal mencegah iblis namun Hakim memutus *Niet Otvankelijt Verklard* (NO),²⁸ Chandan Kumar Singh yang menggugat Dewa Rama karena menganiaya Dewi Sita dimana hakim menolak kasus tersebut karena dinilai tidak praktis.²⁹ Terhadap kasus tersebut, maka dapat diidentifikasi sosok Tuhan yang

untuk manusia dalam Irham Nugroho, 'Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11.2 (2016), pp. 167–77, doi:10.31603/cakrawala.v11i2.192.

¹⁸ Perlu digaris bawahi bahwa setiap peradaban memiliki kelemahan, pada peradaban positif, teologi dipandang *non sence*, sedangkan metafisika dipandang sebagai parasite.

¹⁹ Andri G. Wibisana, 'Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kasus Lingkungan', *CELCJ*, 14 November 2022 <<https://celcj.law.ui.ac.id/tangan-tuhan-di-pengadilan-dalih-bencana-alam-dan-pertanggungjawaban-perdata-dalam-kasus-lingkungan/>>.

²⁰ 'Mengapa Hakim Disebut Sebagai Wakil Tuhan? | Tempo.Co' <<https://www.tempo.co/hukum/mengapa-hakim-disebut-sebagai-wakil-tuhan--236808>> [accessed 26 March 2025].

²¹ 'Hakim [Masih] Wakil Tuhan? | Oleh: Ahmad Z. Anam (29/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama' <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-masih-wakil-tuhan-oleh-ahmad-z-anam-29-7>> [accessed 26 March 2025].

²² 'David Ibn Shoshan on Spirit and Soul in: European Journal of Jewish Studies Volume 1 Issue 1 (2007)' <https://brill.com/view/journals/ejjs/1/1/article-p63_4.xml> [accessed 26 March 2025].

²³ 'Merasa Hidupnya Sengsara, Pria Ini Gugat Tuhan Ke Pengadilan' <https://internasional.kompas.com/read/2016/05/08/16221421/Merasa.Hidupnya.Sengsara.Pria.Ini.Gugat.Tuhan.ke.Pengadilan?lgn_method=google&google_btn=onetap> [accessed 26 March 2025].

²⁴ Dalam gugatan yang diberikan oleh Betty Panrose, Tuhan dianggap gagal dalam dalam pemeliharaan dan pengelolaan alam termasuk dalam hal ini ialah cuaca di wilayah Negara Bagian Arizona. Lihat dalam Dan Foster, 'The Day Betty Penrose Sued God', *Backyard Church*, 27 July 2023 <<https://medium.com/backyard-theology/the-day-betty-penrose-sued-god-c376139e1cc6>>.

²⁵ Pembagian kerugian ini diantaranya ialah kerugian umum (*general damage*) sebesar USD75.000 dan ganti rugi tambahan sebesar USD 25.000.

²⁶ 'Nebraska State Senator Ernie Chambers Sued God in State District Court', *The Blackacre Times*, 13 July 2011 <<https://theblackacretimes.com/2011/07/13/civ-pro-case-study-deities/>>.

²⁷ Federal Court, 'Civil Procedure & Federal Courts (Chambers v. God)' <<https://lawprofessors.typepad.com/civpro/2007/10/chambers-v-god.html>> [accessed 26 March 2025].

²⁸ Kasus tersebut kemudian tidak diterima oleh pengadilan oleh karena Tuhan bukanlah seorang individu ataupun atau perusahaan sehingga tidak tunduk pada yurisdiksi putusan perdata di Romania dalam *Lawyers Weekly and Digital*, 'Folklaw 18 November', 18 November 2005 <<https://www.lawyersweekly.com.au/sme-law/3765-folklaw-18-november>>.

²⁹ '4 Orang Yang Pernah Gugat Tuhan Di Pengadilan, Ada Yang Dinyatakan Menang | Halaman Lengkap' <<https://international.sindonews.com/read/1093347/45/4-orang-yang-pernah-gugat-tuhan-di-pengadilan-ada-yang-dinyatakan-menang-1683669921?showpage=all>> [accessed 26 March 2025].

dapat dipahami di Pengadilan diantaranya (1) Tuhan adalah sebuah Individu yang tercermin dari Gugatan David Ibn Shosan, Betty Panrose, Ernie Chambers, Pavel dan Chandan Kumar Singh; serta (2) Tuhan adalah sebuah gelar sebagaimana diidentifikasi pada tulisan Wibisana dan Ahmad Z. Anam.

Konsepsi tentang keberadaan Tuhan yang dibuktikan dalam serangkaian peristiwa tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi dari Tuhan sebagai sebuah gelar dan Tuhan sebagai sebuah individu/oknum. Fenomena ini kemudian menjadi menarik untuk dibahas sebab Pengadilan turut menggunakan kata “Tuhan” dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim nampaknya akan menjadi sebuah kajian yang menarik untuk dibahas. Ditilik dari latarbelakang tersebut, maka jurnal berjudul “Adakah Tuhan di Pengadilan?” disusun untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yakni (1) Apakah Tuhan eksis di Pengadilan? (2) Bagaimana wujud keberadaan Tuhan di Pengadilan? Adapun tujuan penulisan jurnal ini diperuntukan sebagai sebuah kajian *softscience* terhadap representasi dan koeksistensi dari Tuhan di Pengadilan dalam sebuah kajian filsafat perineal serta sebuah naskah didaktik terhadap maksud dari *enigma* “Tuhan” dalam Putusan Hakim.

LANDASAN TEORI

A. Konsepsi *Besluiten* Dalam Putusan Hakim

Eratnya hubungan antara kebijakan dan kewenangan ‘*bevoeght*’ dilatarbelakangi oleh praktik pelaksanaan tugas-tugas dalam pemerintahan ‘*bestuurzorg*’.³⁰ Kewenangan dipahami sebagai kapasitas dalam menentukan tindakan hukum³¹ sementara kebijakan bertindak sebagai *output* dari kewenangan.³² Perenungan dari Lon L. Fuller dalam *The Morality of the Rule of Law* menghasilkan konsepsi baru sebagai etika administrasi yang dikenal dengan *internal morality*.³³ *Internal morality* dicacah kedalam 8 (delapan) kriteria dasar³⁴ dengan larangan benturan kebijakan menjadi salah satu kriteria yang disebutkan oleh Fuller.³⁵ Dengan kata lain, tulisan Fuller semata-mata dimaksudkan agar pejabat pemerintah taat kepada hukum administrasi sebab di dalamnya terdapat norma pemerintahan ‘*bestuurnorm*’ dan norma perilaku aparat ‘*gedrasnorm*’.³⁶ Ketaatan tersebut

³⁰ ‘Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah – PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR’ <<https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>> [accessed 24 July 2023].

³¹ Isakh Manubulu and I Suyatna, *Archetypes Kewenangan: Sebuah Kajian Kritis Pemikiran I Nyoman Suyatna*, 2020, doi:10.13140/RG.2.2.10582.06725. (Manubulu - Tentang Kewenangan). Lihat juga dalam I Nyoman Suyatna, 2019, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pembentukan peraturan Daerah”, Malang, CV. Nuswantara, h. 351-370.

³² Kebijakan harus dibatasi oleh kewenangan sedangkan kewenangan bertindak sebagai *ipso facto* dari kebijakan.

³³ ‘PRINSIP HUKUM MENURUT PROF. LON LUVIS FULLER (GURU BESAR HARVARD)’, *DETIK MAHASISWA HUKUM* <<https://www.detikmahasiswahukum.com/2020/05/prinsip-hukum-menurut-prof-lon-luvis.html>> [accessed 24 July 2023].

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Op.cit.*, Manubulu-Tentang Kewenangan, h. 1.

³⁶ Fauzi Syam, Sukamto Satoto, and Helmi Helmi, ‘Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang’, *Undang: Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), pp. 189–233, doi:10.22437/ujh.6.1.189-233.

akan menghasilkan kualitas legislasi³⁷ yang menurut Konsepsi Mader yang meliputi manajemen, metode, akseptabilitas, perancangan, komunikasi, prosedur, daya guna dan teknik.³⁸ Irianto memberikan instrument *Rule of Law* (RoL) untuk mengukur kinerja legislasi yang meliputi (1) Kepatuhan terhadap prosedur pembentukan hukum, (2) Substansi yang ditawarkan, serta (3) mekanisme kontrol dengan jalur peradilan yang independen.³⁹ Namun pendapat Irianto kemudian dijelaskan oleh Idul Rishan sebagai sebuah pemikiran yang sarat akan konsep Barak tentang *Purposive Interpretation*.⁴⁰ Konsepsi ini mencoba membedah hukum dari sisi teologis hukum yang merupakan titik interpretifisme antara realita dan politik dalam negeri. Beranjak dari pembahasan tentang parameter untuk mengukur performa legislasi, Luc. J. Wintgens memperkenalkan sebuah model pendekatan hukum (*legal approach*) yakni pendekatan legisprudensi yang merupakan sebuah pendekatan rasional pada proses legislasi baik secara teori maupun praktik.⁴¹ Rasionalitas dalam pembentukan hukum di dorong oleh hasrat pencari keadilan '*rechtzoekenden/justiciabelen*' terhadap intensi pembentukan hukum.⁴²

Ketidakterpisahan antara rasionalitas dan intensi *justiciabelen* adalah *causa sui* dari pembentukan hukum yang ideal, yang berarti bahwa validitas dari sebuah norma ditentukan pada ide normative dan ide faktual yang melandasi pembentukan norma tersebut.⁴³ Hal ini yang kemudian melemahkan analisis Idul Rishan.⁴⁴ Sehubungan dengan itu, konsepsi peraturan kebijakan seharusnya dibangun diatas prinsip bahwa pembentukan hukum harus rasional sebab kebijakan merupakan *ipso facto* dari realitas sosial.⁴⁵ Paradigma otoritarianisme yang bergerak dalam sector pemerintahan telah memunculkan fakta bahwa peraturan kebijakan merupakan *expresis verbis* dari pejabat berwenang. Konsepsi peraturan kebijakan harus dapat memilih terhadap jenis kaidah yang

³⁷ Legislasi dipahami sebagai aktifitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini, *staatsregelingen* dalam arti luas '*besluiten*' dikelompokkan menjadi wettelijk regeling (peraturan perundang-undangan), *beleidsregels* (peraturan kebijakan dan *beschikking* (penetapan). Diani Kesuma, 'Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara', *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 7.1 (2021), pp. 133–45, doi:10.35814/selisik.v7i1.2431.

³⁸ *Op.cit*, Idul Rishan, h. 51.

³⁹ *Ibid*, h. 52. Lihat juga catatan kaki Idul Rishan yang mengomentari pendapat Irianti dipengaruhi oleh Konsep Barak (Aharon Barak) dalam Idul Rishan, 'Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 18.1 (2021), pp. 001–21, doi:10.31078/jk1811.

⁴⁰ Penelitian yang diberikan oleh Manulang tidak memberikan titik terang terhadap pemahaman *purposive interpretation* sebab terlalu sarat akan premis-premis dialektik Lihat E. Fernando M. Manulang, 'PENAFSIRAN TELEOLOGIS/SOSIOLOGIS, PENAFSIRAN PURPOSIVE DAN AHARON BARAK: SUATU REFLEKSI KRITIS', *Veritas et Justitia*, 5.2 (2019), pp. 262–85, doi:10.25123/vej.v5i2.3495.

⁴¹ *Loc.cit*, Idul Rishan, h. 44.

⁴² *Op.cit*, Manulang, h. 262.

⁴³ *Op.cit*, Sebastian-Anti-Positifisme, h. 463.

⁴⁴ Setelah membaca Konsep Pengujian Formil dan Evaluasi Performa Legislasi yang disusun oleh Idul Rishan, penulis menemukan sebuah fakta bahwa Idul Rishan tidak konsisten dengan mazhab yang diyakininya. Dalam hal ini, analisis dalam kedua tulisan tersebut sarat akan pertimbangan *positivisme* namun simpulannya disusun dalam sebuah pemikiran politik sayap kiri (*antipositifisme*).

⁴⁵ Isakh Manubulu and others, *KONKRITISASI NILAI SOSIOLOGIS HUKUM ADAT SEBAGAI REALITAS SOSIAL DITINJAU DARI AWIG -AWIG DESA PAKRAMAN PADANGTEGAL*, 2018, doi:10.13140/RG.2.2.19780.45444.

hendak diatur, baik dalam hal ini ialah kaidah/norma deskriptif, disjungtif atau injuktif⁴⁶. Hasil telaah AP Zudan terhadap Pasal 17 s/d Pasal 21 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut kepada PTUN memberikan sebuah rekomendasi tentang arah peraturan kebijakan yakni untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum⁴⁷ serta melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang '*willekeur*'.⁴⁸ Adapun beberapa kriteria perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah diantaranya ialah:

- (1) Melampaui wewenang dengan kriteria berupa keterlampaian masa jabatan berlakunya wewenang, keterlampaian wewenang terhadap batas-batas wilayah serta keterlampaian dari ketentuan hukum yang berlaku yang berdampak pada tidak sahnya sebuah peraturan dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;⁴⁹
- (2) Mencampur adukan wewenang yang terjadi ketika sebuah kewenangan ditentukan diluar cangkupan bidang/materi serta bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan berdampak terhadap dibatalkannya sebuah kebijakan;⁵⁰
- (3) Bertindak sewenang-wenang sebagai sebuah tipologi perbuatan sewenang-wenang '*willekeur*' yang paling lumrah dipraktikkan sebagai bentuk pelanggaran administrative yakni pembentukan peraturan kebijakan tanpa kewenangan serta bertentangan dengan Putusan pengadilan sehingga berdampak terhadap tidak sahnya peraturan tersebut (lazimnya dalam perkara perdata).⁵¹⁻⁵²

Peraturan kebijakan yang lahir dari tindakan pemerintah '*bersturendelingen*' dibagi atas tindakan faktual '*fetelijke hendelingen*' dan tindakan hukum '*rechtshendelingen*'. Tindakan faktual merupakan sebuah perbuatan konkret yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 8 UU AP serta Pasal 87 UU AP. Sedangkan *rechthendelingen* dibedakan atas implikasi hukum secara administratif dan dibagi atas tindakan bersegi satu '*eenzijdige*' dan tindakan bersegi dua yakni *tweezijdige*. Adapun sifat dari *eenzijdige* selain sebagai pengaturan '*reglement/pseudo-wetgeving*', menetapkan '*beschiking*', norma konkrit '*concrete normgeving*' dan rencana '*plan*'. Berbeda halnya dengan *tweezijdige* yang melibatkan pihak lain dalam pembentukannya dalam hal ini dapat dicontohkan dengan kontrak. Membaca dari uraian

⁴⁶ WHO, *Global School Based Student Health Survey*, This Is the Second GSHS Conducted by Indonesia (World Health Organization, 2015), p. 2018 <<https://helpfulprofessor.com/injunctive-norms/>>.

⁴⁷ Idul Rishan menggunakan istilah *due process of law making* untuk menggambarkan kerangka dasar tujuan penegakan hukum.

⁴⁸ Rujukan untuk menggambarkan perbuatan sewenang-wenang meliputi *verklared woordenbroek openbaar bestuur* ataupun *detournement de pouvoir*, Lihat dalam *Op.cit.*, Syam, Satoto, and Helmi, 'Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang'..

⁴⁹ *Vide* Pasal 17 ayat (2) Huruf a *jo.* Pasal 18 ayat (1) UU AP.

⁵⁰ *Vide* Pasal 17 ayat (2) Huruf b *jo.* Pasal 18 ayat (2) UU AP.

⁵¹ *Vide* Pasal 17 ayat (2) Huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) UU AP.

⁵² Baca penjelasan Muhammad Adiguna Bimasakti, 'Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah – PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR' <<https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>> [accessed 25 July 2023].

tersebut, sebenarnya konsepsi peraturan kebijakan seharusnya di dasarkan oleh garis resmi tentang hukum yang diberlakukan dengan ruang lingkup berupa (1) Kebijakan negara yang berlaku atau tidak lagi berlaku, (2) Kesesuaian dengan latarbelakang ekonomi, politik, sosial dan budaya sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai *volunte generale* serta (3) Kesesuaian kebutuhan atas penegakan hukum di lapangan.

Performa legislasi pada pembentukan sebuah peraturan kebijakan diukur dari kematangan yuridis dan praktis. Dalam hal ini, salah baca '*dwang*', paksaan '*dwaling*' dan tipuan '*berdog*' merupakan konsekuensi logis dari ketidakmatangan yuridis.⁵³ Sedangkan secara praktikal, sebuah peraturan kebijakan dapat dikatakan menindas secara halus '*gentle oppression*' jika peraturan kebijakan tersebut tidak dibentuk atas dasar kenyataan di lapangan apalagi jika kebijakan tersebut membantarkan pandangan hidup '*weltanschauung*' yang telah menjadi riwayat '*rechtgesichte*' dari kehidupan bernegara. Dalam hal ini, pembentukan negara tidak berdasar atas kekuasaan bukan merupakan sebuah pilihan leksikal '*lexical choice*'⁵⁴ namun merupakan sebuah realita bahwa Negara tidak lain merupakan sebuah lembaga sosial.⁵⁵ Hal ini berarti bahwa sekalipun pejabat negara memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi kewenangan tersebut diberikan diatas prinsip *delegated authority* dan bukan merupakan kewenangan orgininal '*original authority*' sehingga pembuat kebijakan harus patuh terhadap batasan-batasan kewenangan yang dimiliki.⁵⁶ Lahirnya peraturan kebijakan seharusnya dapat mempertahankan semangat konstitusional dalam sebuah negara⁵⁷ bukan justru mendiskrepansi filosofi dalam bernegara.⁵⁸ Merujuk pada analisis tersebut, maka konsepsi dasar pembentukan peraturan kebijakan terletak pada rasionalitas dari Pejabat Negara yang oleh rasionalitas tersebut, yang mana rasionalitas tersebut diukur oleh

⁵³ Mengutip pandangan Utrecht '*geen juridische gebreken in de wilsforming*' yang berarti bahwa karena kebijakan dibentuk atas pernyataan keyakinan '*wilferklaring*' dari pejabat negara maka kebijakan tersebut tidak boleh mengandung kekurangan yuridis.

⁵⁴ Lihat Manubulu III.

⁵⁵ Manifesto Politik Soekarno berjudul "Penemuan Kembali Resolusi Kita" mengemukakan kedudukan hukum sebagai sebuah pengayom, gotong royong, kekeluargaan, toleransi, anti colonial, imperial dan fedoalisme. Lihat dalam Muhammad Dahlan, 'Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.2 (2018), pp. 187-217, doi:10.22437/ujh.1.2.187-217.

⁵⁶ Prinsip '*delegated authority*' diberlakukan oleh karena Legislatif sebagai '*original authority*' terlambat dalam mengikuti perkembangan sosial sehingga kemudian fungsi *reglementer* dan *fungsi legislative* diberikan dari peraturan yang lebih tinggi dengan kewenangan yang terus menerus sesuai dengan batas-batasnya sehingga melahirkan sebuah ide yang dikenal dengan *fraise ermesent*.

⁵⁷ Salah satu poin penting dari Tab MPR No. II/MPRS/1960 tentang Manipol USDESK memuat sosialisme Indonesia dan kepribadian Indonesia sebagai pilar utama pembangunan negeri.

⁵⁸ Ronald Dworking dalam pemikiran antipositifisme mengutarakan bahwa jika hukum mengikat karena otoritasnya maka pejabatlah hukumnya. Dengan kata lain, letak dari *law making* berada pada pejabat yang berwenang sedangkan bila hukum mengikat dari argumentasinya maka hukum tertulis bukan hukumnya (sebuah antithesis terhadap pemikiran subsumsi mekanis yang murni Arif Sidharta) sehingga hukum dalam karakteristik kedua terletak pada kaum sofistik. Lihat dalam Manubulu III dan Tanius Sebastian, 'Anti-Positivism Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas', *Undang: Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), pp. 269-308, doi:10.22437/ujh.6.1.269-308.

kemampuan pejabat negara dalam menetapkan sebuah kebijakan dengan tetap memandang pada keutamaan teoritis.

B. Konsep Epiktolisme Dalam Hubungannya dengan Putusan Hakim

Epiktolisme merupakan sebuah paham yang muncul pada abad ke 20. Konsep ini merupakan hasil pembedahan terhadap fenomena hermeneutis pada proses pembuatan sebuah keputusan. Secara harafiah, epiktolisme berasal dari kata “epik” yang pertama kali muncul dalam naskah “*poem of Gilgamesh*” (sebuah naskah Uruk yang populer di abad 2600 SM)⁵⁹ dan “*logos*” yang berarti ilmu. Istilah epiklogi ini muncul dalam pengembangan Hermeneutika Hukum v. Teori Penafsiran Murni⁶⁰ yang kemudian menemukan kesimpulannya bahwa epiktolisme merupakan sebuah “seni penafsiran hukum”.

Fenomena seni dalam bertafsir ini kemudian memunculkan sebuah asumsi tentang performa pengambilan sebuah Putusan Hakim yang kemudian berimbas pada praktik negara hukum ‘*rechtstaat*’⁶¹ di Indonesia. Keberadaan dari *rechtstaat* hadir sebagai eksponen⁶² dari negara kekuasaan ‘*machtstaat*’ serta *restraint*⁶³ terhadap paradigma otoritarianisme dalam sebuah negara demokrasi. Sederhananya, keberadaan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebagai sebuah *legal terma* dalam materi konstitusi, melainkan sebagai cara untuk memahami tujuan, sumber penggunaan serta pembatasan kekuasaan terhadap paham otoritarianisme yang sarat pada masa orde baru. Pejabat Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan termasuk pada Putusan yang dibuat oleh Hakim dengan bersinggungan langsung pada jabatannya namun juga harus memperhatikan batasan-batasan yuridis yang telah ditentukan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Sidharta memberikan penjelasan tentang fungsi konservatif hukum yakni untuk memelihara dan mempertahankan apa yang telah dicapai⁶⁴ sehingga sikap dari pejabat pemerintah yang bertindak sewenang-wenang berpotensi dapat merusak tatanan fungsi konservatif hukum dalam penyelenggaraan negara.

Peraturan kebijakan lahir dari sebuah proses legislasi telah dirasionalisasikan sebagai perilaku normative ‘*normative behavior*’ dari pejabat yang berwenang (Hakim), menyiratkan sebuah kesan bahwa praktik legalitas dijadikan sebagai permainan atas dasar kebijaksanaan dalam memutus.⁶⁵ Ini menjadi sebuah persoalan penting sebab salah satu

⁵⁹ J. Fassbinder, H. Becker, and M. van Ess, ‘Magnetometry at Uruk (Iraq): The City of King Gilgamesh’, 2003, p. 9152.

⁶⁰ Isakh Benyamin Manubulu, *Pelebagaan Mahkamah Partai Politik di Indonesia (Pengantar Epiktolisme Hukum)*, 1st edn (Tanggung Denara Jaya, 2022).

⁶¹ *Vide* Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

⁶² Eksponen ialah sebuah gambaran dasar tentang kuatnya sebuah bilangan/variabel.

⁶³ *Restraint* digunakan oleh Ivo Duchacek untuk menggambarkan penggunaan konstitusi sebagai sebuah sarana pembatasan kekuasaan, lihat Ivo D. Duchacek, 1987, “*Constitution and Constitutionalism*”, dalam Blackwell’s Encyclopedia of Political Science, ed. Bogdanor dan Vernon, Oxford, h. 142.

⁶⁴ Isakh Benyamin Manubulu, 2023, “506 Tahun Jejak Otonomi Di Pulau Rote, Jilid 1. Tersesat Dalam Pemahaman Nusak”, Kupang, Tangguh Denara Jaya, h. 44. (selanjutnya disebut Manubulu III)

⁶⁵ *Ibid*, Manubulu III.

premis metafisis dasar dalam legalisme yang diperkenalkan oleh Luc J. Wintgens ialah legalitas oleh *etatism*⁶⁶.

C. Konsepsi Metaprosesual Enigma “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Metaprosesual adalah sebuah konsepsi yang merujuk pada sebuah permodelan atau teknik dalam perumusan sebuah ide. Lebih umum, konsepsi ini disebut dengan “Meta Proses”. Pranala KBBI menentukan padanan “Meta” dipersamakan dengan *mabuk, mengamuk dan mengganas*⁶⁷ sedangkan “Proses” merujuk pada *runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sebuah aspek*.⁶⁸ Istilah meta turut disepadankan dengan “lebih kompleks” atau “melampaui” yang dalam hal ini, jika “meta” digunakan pada sebuah “proses” maka sebenarnya maksud harafiah yang hendak dikejar ialah kajian kompleks terhadap proses yang dimaksud dalam enigma Putusan Hakim “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsepsi meta-proses ini dapat ditelusuri dalam tulisan Rogério Roberto Gonçalves de Abreu *et.al* yang mengkaji tentang metaprosesual dari Putusan hakim yang tidak berefek terhadap keadilan.⁶⁹ Pemahaman tersebut dibangun dari pemikiran Freud dan Jung tentang alam bawah sadar yang lebih umum dikenal dengan Analogi Gunung Es⁷⁰ dimana terdapat 3 (tiga) tingkatan pemikiran yakni alam sadar (*conscious*), prasadar (*preconscious*) dan ketidaksadaran (*unconscious*). Analogi ini kemudian menciptakan 3 (tiga) level dari pikiran manusia diantaranya level 1. Alam sadar (*conscious*) yang memunculkan sebuah perilaku hanya merepresentasi 10% dari pikiran manusia; Level 2. Prasadar (*preconscious*) yang dipengaruhi oleh ingatan dan pengetahuan; serta Level 3. Ketidaksadaran (*unconscious*) yang dipengaruhi oleh insting, ketakutan, ego dan motivasi.⁷¹ Dalam simpulannya, Rogério Roberto Gonçalves de Abreu *et.al* menyimpulkan bahwa Putusan yang dibuat oleh hakim adalah sebuah bentuk putusan pada level 2 yakni prasadar (*preconscious*). Keadaan setengah sadar/prasadar dari hakim dalam memutus sebuah perkara ini menjadikan sebuah catatan penting enigma putusan pengadilan.

⁶⁶ *Etatism* merujuk pada pejabat pemerintah ataupun pihak-pihak yang memegang jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis *etat* dipopulerkan oleh Raja Louis XIV dengan semboyan ‘*L’État, c’est moi*’ untuk melegitimasi kedudukan kerajaan di hadapan Parlemen dalam Isakh Benyamin Manubulu dan Randi Vallentino Neonbeni, 2023, “*Bahan Ajar Hukum Laut Internasional*”, Kupang, Tangguh Denara Jaya, h. 84.

⁶⁷ ‘Arti Kata Meta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’ <<https://kbbi.web.id/meta>> [accessed 27 March 2025].

⁶⁸ ‘Arti Kata Proses - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online’ <<https://kbbi.web.id/proses>> [accessed 27 March 2025].

⁶⁹ Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, Lúcio Grassi de Gouveia, and Virgínia Colares, ‘Fatores metaprocessuais e suas influências para a formação da decisão judicial’, *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, 8.2 (2018), pp. 661–87, doi:10.5102/rbpp.v8i2.5243.

⁷⁰ ‘Freud’s Theory of the Unconscious Mind: The Iceberg Analogy’, 25 January 2024 <<https://www.simplypsychology.org/unconscious-mind.html>>.

⁷¹ Lihat Gambar ‘Freud’s Theory of the Unconscious Mind’.

Enigma “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini merupakan salah satu alasan mendasar yang paling mempengaruhi sebuah Putusan Pengadilan.⁷² Keberadaan dari enigma tersebut memunculkan sebuah kesan bahwa pendapat “Tuhan” telah sebelumnya dipertimbangkan. Lantas, keberadaan tentang Tuhan yang transenden dan imanen kemudian menjadi sebuah catatan merah dalam enigma putusan pengadilan dimana Putusan yang diwujudkan seharusnya mampu menjawab sebuah persoalan hukum ditengah masyarakat, bukan semata-mata pada aspek keterpenuhan unsur sebab Tuhan melampaui pikiran manusia.⁷³ Penggunaan istilah “Tuhan” mencerminkan sebuah kemahakuasaan dari Tuhan yang tidak terbatas (*God Almighty*)⁷⁴ dan umumnya digunakan dalam diksi Tetragrammaton pada kepercayaan Yahudi. Generalisasi ini yang kemudian menciptakan kesan bahwa sebuah keputusan yang dibuat telah searah dengan kehendak dari Tuhan.

Thomas Aquinas (1225-1274) yang merupakan seorang Imam Dominikan pada puncak zaman skolastik menjelaskan tentang keterpisahan antara pengetahuan alamiah dan pengetahuan iman sehingga tidak dapat disepadankan. Ia menjelaskan bahwa pengetahuan alamiah timbul dari akal budi sedangkan pengetahuan iman berfokus pada wahyu Allah. Keadaan dimana mengawinkan pengetahuan alamiah dan iman ini menurut Plato dalam “*Allegory of the cave*” adalah sebuah kesalahan.⁷⁵ Menggabungkan kenyataan/realita dengan khayalan ini dianggap sebagai sebuah teknik yang salah. Analogi ini dijelaskan oleh Benjamin J terhadap analisis pikiran Plato bahwa “*the same goods should not be offered at two prices on the same day*”⁷⁶, makna yang terkandung disini ialah kenyataan

⁷² Dalam kutipan aslinya “*Entre todos os fatores metaprocessuais de influência na tomada de decisão, um dos mais delicados e, de certa forma, que mais preocupam a sociedade em geral e a comunidade jurídica em particular é aquele ligado aos valores religiosos do julgador, à religião por ele professada, seu sentimento de pertença a determinado grupo ou comunidade religiosa. De maneira semelhante a outros fatores como os vínculos político-partidários e as bases culturais, morais e filosóficas, os valores religiosos podem influir decisivamente nos critérios de julgamento em questões de interesse geral da população. Sua importância, assim, é inquestionável*” yang jika diterjemahkan “*Di antara semua faktor metaprosesual yang mempengaruhi pengambilan keputusan, salah satu yang paling rumit dan, dengan cara yang paling menjadi perhatian masyarakat secara umum dan komunitas hukum secara khusus adalah yang terkait terhadap nilai-nilai keagamaan sang hakim, terhadap agama yang dianutnya, terhadap rasa memiliki terhadap suatu kelompok tertentu, kelompok atau komunitas keagamaan. Seperti halnya faktor-faktor lain seperti ikatan partai politik dan basis budaya, moral dan filosofis, nilai-nilai agama dapat secara menentukan mempengaruhi kriteria penghakiman atas masalah-masalah kepentingan umum masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya hal itu tidak perlu diragukan lagi*” dalam Rogério Roberto Gonçalves de Abreu *et.al*, *Ibid*, h. 680.

⁷³ Bandingkan dengan pemikiran Anselmus (1033-1109 SM) “*Credo ut intelegam, aliquid quo nihil maius cogtari pocit*”.

⁷⁴ Stephen N. Lambden, ‘The Names of God and Theories of His Mightiest or Greatest Name (al-Isim al-A`zam) with Special Reference to the Mişbah (Luminary) of Tāqī al-Dīn Kaf`amī (d. 900/1494-5) and to Bābī-Bahāī Theologies of His Eschatological Name.’ <<https://faculty.ucmerced.edu/slambden/abstracts/Names%20of%20God-Acuto.htm>> [accessed 27 March 2025].

⁷⁵ Mike Bedard on, ‘Plato’s Allegory of the Cave — Summary & Meaning Explained’, 27 January 2025 <<https://www.studiobinder.com/blog/platos-allegory-of-the-cave/>>.

⁷⁶ ‘Dialogues, Vol. 5 - Laws, Index to the Writings of Plato | Online Library of Liberty’ <<https://oll.libertyfund.org/titles/plato-dialogues-vol-5-laws-index-to-the-writings-of-plato>> [accessed 27 March 2025].

(akal budi) dan khayalan (iman/kepercayaan) adalah sebuah barang yang sama, keduanya tidak dapat ditawarkan dengan harga yang sama (Putusan Pengadilan).

Akal budi yang dikembangkan dalam paham positivistic bahwa "*law is a knowledge*" berbeda dengan iman yang berada pada tataran metafisika. Iman mengakui tentang keberadaan dari Tuhan. Teologi kodrati Thomas Aquinas mengklasifikasikan 5 (lima) cara (*quinque viae*) untuk mengetahui keberadaan dari Tuhan diantaranya (1) gerak (*motus*) : gerakan yang tidak ditimbulkan oleh gerakan lain disebut Allah; (2) sebab akibat (*ex ratione causae efficiens*) : penyebab yang tidak disebabkan oleh penyebab lain adalah Allah; (3) Argumen probabilitas dan keniscayaan di dunia (*ex possibili et necessario*) : sesuatu yang bersifat mutlak penuh adalah Allah; (4) berdasarkan derajat-derajat kualitas dari segala sesuatu (*ex gradibus qui in rebus inveniuntur*) : ukuran superlative dan sempurna adalah Allah; (5) segala sesuatu di dunia terselenggara dengan baik (*ex gubernatione rerum*) : Allah adalah penyelenggara yang menggerakkan segala ciptaannya, penyelenggara tertinggi tersebut yang disebut Allah.

Keadaan ini berbanding terbalik dengan perilaku manusia yang dinamis, sebab hukum adalah sebuah pengetahuan, maka rasio murni (*reine vernunft*) dari hukum adalah perkembangan⁷⁷ berbeda dengan Tuhan yang tidak tertandingi (*semper invictus*) dan tidak berubah (*deus nonquam*). Mekanisme judicial yang dilakukan pada setiap tingkatan proses peradilan menampilkan sebuah sifat yang dinamis sehingga perlu untuk ditelusuri lebih lanjut. Penelusuran ini yang kemudian mengarah pada Putusan pengadilan merupakan sebuah bagian dari peraturan kebijakan dimana ruang lingkupnya harus memenuhi 3 (tiga) aspek utama yakni (1) Kebijakan negara yang berlaku atau tidak lagi berlaku; (2) Kesesuaian dengan latarbelakang ekonomi, politik, sosial dan budaya sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai *volunte generale*; serta (3) Kesesuaian kebutuhan atas penegakan hukum di lapangan. Alasan ini kemudian mendasari sebuah pertimbangan bahwa jika putusan pengadilan merupakan sebuah upaya penegakan terhadap kebijakan negara, maka semata-mata yang dikejar dari setiap putusan pengadilan adalah keterpenuhan materil (Putusan Pengadilan hanya mengukur terhadap unsur-unsur regulasi yang terpenuhi saja). Keadaan berikut ialah ketika Putusan Pengadilan ditempatkan sebagai sebuah kaidah yang dibentuk dengan latarbelakang dan kebutuhan penegakan hukum (untuk menjawab sebuah fenoeman sosial) maka aspek (2) dan (3) saja yang sepatutnya dikejar.⁷⁸

Ketidakterpenuhan dari setiap unsur tersebut kemudian menciptakan sebuah kesan secara administrative terhadap sebuah peraturan yang dibentuk. Jika hukum dibentuk hanya dengan memandang pada aspek (1) maka problema yang terjadi ialah salah baca

⁷⁷ Konsepsi ini juga ditemukan dalam beberapa tulisan termasuk teori nalar murni yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan kemudian dikritik dalam sebuah pemikiran "*critic der reinen vernunft*" lihat dalam

⁷⁸ Analogi berdasarkan kajian teori.

'*dwang*', paksaan '*dwaling*' dan tipuan '*berdog*' akibat dari ketidakmatangan yuridis.⁷⁹ Sedangkan jika yang dikejar ialah keterpenuhan unsur pada butir ke (2) dan (3) yang lebih berfokus pada pengalaman empirik maka secara praktikal, Putusan yang dibentuk dapat dikatakan menindas secara halus '*gentle oppression*' terhadap para pelanggar sebab pembentukan sebuah aturan di dasarkan pada kenyataan di lapangan yang telah menjadi pandangan hidup '*weltanschauung/aforisme*' dari masyarakat multikulturalisme. Ide ini dikembangkan dalam ontology multikulturalisme Hans-Georg Gadamer dimana Ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ada atau hakikat kenyataan.⁸⁰ Keadaan ini yang kemudian disebut fenomena hermeneutis dimana pertama, multikulturalisme merupakan sebuah bentuk komunikasi antara manusia dan pengalaman individu; sedangkan kedua, *ontology multikulturalisme* seperti tradisi, kesadaran sejarah efektif, dialog, dan pemahaman. (Perpaduan horizon budayan).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan analisis dan pendekatan konseptual dikombinasikan dengan metode kritis konstruktif yang merupakan sebuah metode untuk pembentukan bangunan pengetahuan atas subyek yang dijadikan telaah penelitian. Dalam hal ini, obyek penelitian ini berfokus pada *enigma* Putusan Pengadilan yang memuat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ada Tidaknya Tuhan di Pengadilan

Ajaran Thomas Aquinas tentang Allah adalah *exist* merupakan sebuah bagian tentang pencarian keberadaan Allah yang dilakukan oleh manusia. Ia kemudian menciptakan sebuah dogma tentang *triplex via* (jalan triganda) terhadap kesamaan dari Allah dan ciptaannya. Ketiga jalan tersebut diantaranya (1) Jalan positif atau jalan afirmatif (*via positive/via affirmativa*); (2) Jalan Negatif (*via negativa*); (3) Jalan keunggulan (*via eminentiae*). Pada kerangka yang pertama, pemahaman tentang Allah dibangun bahwa "Allah adalah baik, begitu pula dengan manusia"; pada kerangka kedua, Kebaikan Allah tidak dapat diukur dalam sebuah ukuran (*metrology*) yang sama dengan ukuran "baik" pada manusia; (3) Pada kerangka ketiga, manusia hanya berusaha menampakan kesamaannya dengan Allah.⁸¹ Keadaan inilah yang menimbulkan sebuah pertanyaan resiprokal antara hubungan manusia dengan Allah dan kelayakan dari seorang manusia sebagai representasi Allah.

⁷⁹ Mengutip pandangan Utrecht '*geen juridische gebreken in de wilsforming*' yang berarti bahwa karena kebijakan dibentuk atas pernyataan keyakinan '*wilferklaring*' dari pejabat negara maka kebijakan tersebut tidak boleh mengandung kekurangan yuridis.

⁸⁰ Mukalam and Murtiningsih, 'Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer sebagai Basis Ontologis Multikulturalisme'.

⁸¹ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual, Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern* (Kanisius, 2004) <www.kanisiusmedia.com>.

Berbicara tentang representasi Allah dalam kajian Kristologi, Allah sebelumnya telah mengambil wujud menjadi manusia yang fana⁸², hal ini ditemukan dalam Filipi 2 : 7⁸³ dimana Yesus Kristus mengambil wujud sebagai manusia serupa dengan seorang hamba. Meskipun menjadi manusia dan telah mengalami fenomena kenosis, akan tetapi Ia tidak kehilangan kuasa-Nya. Representasi dari keilahian Allah membuat Yesus Kristus dapat menciptakan berbagai mujizat.⁸⁴ Awindusiwi turut menyatakan *awatara* dari Sang Hyang Widhi ketika mengambil wujud sebagai Brahma yang tetap memiliki kuasa/nubuatan.⁸⁵ Dalam hal mengambil wujud sebagai perwakilan Allah, maka “*sosok*” yang dimaksud tidak kehilangan kuasanya sebagai Pencipta. Keunikan ini merupakan bagian dari kemahakuasaan Allah yang melampaui alam semesta.⁸⁶

Jika dipahami maka tidak terdapat makna imperative dari Allah yang mengambil rupa sebab “Allah tidak menerima delegasi tugas apapun ketika memilih mengambil rupa menjadi apapun”. Asumsi ini disebabkan oleh absolutism dari Tuhan sebagai zat pembentuk alam semesta.⁸⁷ Istilah “*esa*” atau “*echad*” dalam pemahaman Perjanjian Lama adalah *adjective of quality* (kata sifat kualitas). Ini berfokus pada *unity* (kesatuan), *uniqueness* (*keunikan*) dan monoteisme.⁸⁸ Dalam bahasa Yunani, *Esa* disebut juga “*eis*” yang disebutkan Nabi Musa dengan istilah “*Yachid*” (hanya satu) dalam Ulangan 6:4 dan kejadian 2:24. Keadaan ini searah dengan realitas ultima yang dijelaskan oleh Kusnawanjono (2006:84) tentang hubungan antara Tuhan dengan Agama diantaranya (1) sebelum adanya budaya dan agama, Tuhan yang eksis adalah Tuhan lokal dengan nama dan diri yang juga lokal; (2) Pluralitas Tuhan hanyalah sebuah persoalan penyebutan nama dan tidak bersifat politeisme; (3) Banyaknya Tuhan hanya dilihat dari manifestasinya, nama tidak mempengaruhi sifat manifestasinya; (4) Kuantitas nama Tuhan yang banyak bukan merupakan nama Tuhan yang sebenarnya; sedangkan (5) Esensi dari nama Tuhan tidak dapat diketahui.⁸⁹

Konsepsi Tuhan ini menjadi sebuah *brand* dari Pengadilan yang mencoba mencirikan sifat-sifat Tuhan dalam setiap putusannya meskipun berbanding terbalik dengan maksud Tuhan dalam keniscayaannya. Keadaan “*adil*” yang berusaha digali dalam setiap proses pemeriksaan baik secara administratif maupun secara faktual sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku. Meskipun

⁸² Alfred Marshall Vaughn, ‘GOD’S REPRESENTATIVE’, *The Christian Science Journal*, 1 October 1952 <<https://journal.christianscience.com/issues/1952/10/70-10/god-s-representative>>.

⁸³ ‘MAKNA KENOSIS DALAM FILIPI 2:7 - Jurnal Pelita Zaman - Alkitab SABDA’ <<https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=303&res=jpz>> [accessed 27 March 2025]. Bandingkan dengan ‘Filipi 2:7 (Versi Paralel) - Tampilan Ayat - Alkitab SABDA’ <<https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=filipi&chapter=2&verse=7>> [accessed 27 March 2025].

⁸⁴ Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus ialah menyatakan kuasanya atas setan ketika mengalami pencobaan, lihat dalam Sostenis Nggebu, ‘Konsep Kenosis Yesus Kristus dalam Filipi 2:1-11 sebagai Norma Dasar Spiritualitas Kristen’, *Integritas: Jurnal Teologi*, 5.1 (2023), pp. 1–17, doi:10.47628/jjt.v5i1.132.

⁸⁵ awindusiwi, ‘SANG HYANG WIDHI BRAHMAN YANG BERWUJUD DAN YANG TIDAK BERWUJUD’, *Satyam Sivam Sundaram*, 5 November 2015 <<https://awindusiwi.wordpress.com/2015/11/06/sang-hyang-widhi-brahman-yang-berwujud-dan-yang-tidak-berwujud/>>.

⁸⁶ Konsep monoteisme murni mengakui Allah adalah eksis dan Allah berlainan dengan alam semesta sebab Allah melampaui alam semesta dalam Milton Thorman Pardosi and Siti Murtiningsih, ‘REFLEKSI KONSEP KETUHANAN AGAMA KRISTEN DAN AGAMA ISLAM DALAM PANDANGAN FILSAFAT PERENIAL’, *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1.3 (2018), pp. 91–103, doi:10.23887/jfi.v1i3.16130.

⁸⁷ ‘Filsafat Agama / Trueblood, David’, *DPK Kepri* <<https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/70d5g>> [accessed 27 March 2025].

⁸⁸ Lihat pendapat Jenson dalam Pardosi and Murtiningsih, ‘REFLEKSI KONSEP KETUHANAN AGAMA KRISTEN DAN AGAMA ISLAM DALAM PANDANGAN FILSAFAT PERENIAL’.

⁸⁹ Ibid.

demikian, masyarakat telah mengalami bahwa Pengadilan bukanlah tempat yang adil, oleh karena kualitas dari Putusan Pengadilan dipengaruhi oleh faktor usia, faktor agama dan pemahaman dari seorang hakim.⁹⁰ Dengan kata lain, jika hakim menguasai persoalan dari aspek hukumnya, maka putusan yang dihasilkan adalah keadilan secara materil (keterpenuhan unsur), sebaliknya jika hakim tidak paham dengan sebuah aturan, justru terjebak dalam *preconscious mind* maka putusan yang dihasilkan oleh Hakim adalah putusan *preconscious* yang dipengaruhi oleh berbagai sistem sosial yang dipahaminya⁹¹ alhasil, putusan yang dihasilkan juga akan bersesuaian dengan keadaan sosial dengan mengeliminasi aspek-aspek hukum yang dianggap telah lekang (tidak relevan) karena kewenangan penemuan hukum yang dimiliki oleh hakim. Fenomena ini kemudian mengarah pada pengadilan yang hanya sekedar sebagai sebuah lembaga yang memenangkan kepentingan politik negara⁹² bukan keyakinan berdasarkan aforisme keadilan⁹³ maka sebenarnya tidak tepat jika kata “adil” ditambahkan imbuhan “Peng” dan “an” (dibaca “Peng-Adil-An”) sebab tidak ditemukan keadilan dalam setiap putusannya. Penghapusan kata “Adil” pada “Pengadilan” maka akan menghasilkan makna yang lebih tepat yakni “Peng-an” yang secara geografis merupakan sebuah daerah di Nanchong, Sincuan Cina (Bahasa pinyin: *Péng’ān Xiàn*); Penjual/Pedangan (Bahasa Melayu), serta pengemban, pembawa (beberapa dialek Bahasa Indonesia).⁹⁴

Eksistensi keterwakilan Tuhan dalam sebuah lembaga/profesi merupakan sebuah kekeliruan belaka. Hal ini dikarenakan adanya pelbagai mekanisme pengujian seolah-olah mengukur obyektifitas dari Keputusan Tuhan. Lebih lanjut, arah yang dikejar dengan prosedur *judicial* untuk mencapai putusan yang obyektif, ditenggarai oleh latar belakang pemikiran tertentu terkesan mencederai keilahian dari Tuhan yang *omni*. Pertimbangan yang terlalu yuridis membuat sebuah Putusan yang dibuat seolah-olah bukan merupakan sebuah pertimbangan berdasarkan “kebijaksanaannya” melainkan hanya menjalankan sebuah tugas yang dipercayakan kepadanya. Hal inilah yang kemudian membuat Putusan pengadilan sebagai sebuah produk *besluiten* dari pejabat pemerintah.

B. Wujud Tuhan di Pengadilan

Perkembangan konsep Ketuhanan yang terjadi pada abad pencerahan (*renaisans*) ditandai dengan pergeseran prinsip telogis menuju pemikiran yang lebih rasional dan ilmiah. Namun demikian, pemikiran yang lebih rasional ini menciptakan sebuah persoalan tentang manusia yang memiliki hasrat untuk menguasai sebab rasionalitas selalu menuntut sebuah ukuran. Menilik dari catatan sejarah ketika kejayaan dari Kekaisaran Byzantium kemudian mulai berkurang karena pengaruh dari Vatikan atas permintaan dari Alexander I Komnenos untuk membantu melawan

⁹⁰ Abreu, Gouveia, and Colares, ‘Fatores metaprocessuais e suas influências para a formação da decisão judicial’.

⁹¹ Bandingkan pemikiran ini dengan Teori Ekologi Brofenbrenner yang menjelaskan tentang perkembangan manusia dipengaruhi oleh sistem sosialnya.

⁹² ‘THERE IS NO JUSTICE | Office of Justice Programs’ <<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/there-no-justice>> [accessed 27 March 2025].

⁹³ Aforisme adalah sebuah prinsip yang tegas dan telah diterima secara umum, hal ini disoroti dalam tulisan Jonathan Sisson and others, ‘*There Is No Justice without Injustice*’ *Three Propositions on the Right to Justice and Some Reflections on Dealing with the Past in the Balkans after the ICTY Gotovina and Haradinaj Verdicts*, Acquittal of Gotovina and Haradinaj (Swisspeace, 2014), pp. 20–25 <<https://www.jstor.org/stable/resrep11065.8>>.

⁹⁴ Ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Republik Indonesia di Jakarta pada 28 Oktober 1988.

Turki Usmani sehingga terjadi Restorasi Komnenos.⁹⁵ Lebih lanjut, hasrat tersebut turut dicatatkan pada tahun 1493 ketika Paus Alexander VI dari Borgia menyatakan visi atas kekuatan laut dalam 500 tahun kedepan yang direspon baik oleh Spanyol dan Portugal sehingga lahirlah *Treaty of Tordesilas*; Norwegia dan Denmark dengan *Vast Mare Septentrional* (perjanjian di wilayah laut artic); Inggris melalui Deklarasi *Oceanus Britannicus*; Denmark dan Swedia melalui Perjanjian *Dominium Maris Baltichi* (perjanjian diatas laut Baltic).^{96,97} Setiap kejadian tersebut terjadi ketika manusia mulai mengenal rasionalitas sebagai sebuah ukuran dan mulai menanggalkan ide-ide teisme. Keadaan ini menciptakan wujud Tuhan yang personal mengarah menjadi impersonal sebagaimana konsep deisme yang memandang bahwa Tuhan menciptakan alam semesta namun tidak terlibat aktif di dalamnya.⁹⁸ Hal ini turut muncul dalam sebuah naskah didaktik sebagai kritik pemikiran epikurus berjudul "*De Rerum Natura*" (ditemukan 1473) yang terdiri dari 7.000 *hexameter daktil* dimana materinya merupakan sindiran bahwa Dewa Dewi terlalu sibuk untuk berpesta sehingga tidak mengurus urusan manusia.⁹⁹

Para epikurs meyakini bahwa Tuhan mengambil sebuah wujud dalam bentuk dewa/dewi dan akan memberikan sanksi bagi manusia yang tidak taat dengan perintahnya. Hal ini kemudian membuat raja yang bertindak sebagai *representasi tuhan* di dunia kemudian mampu menarifkan upeti dengan jumlah yang besar kepada masyarakat yang tidak taat, sebab mereka akan dihukum

⁹⁵ Alexander I Komnenos meminta bantuan dalam hal peperangan melawan Turki Usmani namun Sejarah mencatat bahwa Tujuan Awal yang adalah memberikan bantuan perang justru berubah menjadi aktifitas penjarahan diatas wilayah urban Byzantium. Lihat pendapat Monica Ladyana *et.al* yang menjelaskan Tentara perang salib yang kejam membakar Konstantinopel. Melakukan penjarahan, pembunuhan dan pembunuhan. Bahkan mereka juga melakukan tindakan dengan menodai Gereja St. Sophia. Dari beberapa sumber yang diperoleh, dapat di katakan bahwa perpecahan antar gereja (gereja Katolik Roma dan Gereja Timur Konstantinopel) menjadi salah satu faktor internal yang juga menjembatani runtuhnya kekaisaran Bizantium. The Great Schism (Pertentangan dalam gereja) meninggalkan luka sangat dalam bagi kekristenan sehingga menimbulkan masalah besar.

⁹⁶ Pada awal abad ke 16, mengawali Deklarasi Oceanus Britannicus, terdapat perbedaan pendapat dari Inggris terhadap pemikiran Grotius. Lahirnya prinsip Mare Clausum (laut tertutup) vs Mare Liberum (laut terbuka) menurut John Selden pada (1635) selama sebuah negara menguasai laut maka Negara tersebut berdaulat atas potensi diatas wilayah laut, ini berbeda dengan Pontanus memperjelas dengan penjelasan bahwa termasuk di dalamnya ialah kekuasaan untuk melarang pihak ketika Kemudian sebagai bentuk penolakan terhadap prinsip tersebut maka dikembangkan pemikiran *Mare Clausum* oleh Cornelis van Bynkershoek yang menyatakan *terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis* atau lebih dikenal dengan teori tembakan meriam.

⁹⁷ Sengketa Perikanan Antara Inggris Dan Norwegia atau yang lebih dikenal dengan "*the Anglo-Norwegian Fisheries Case*" yang mana Inggris dan Norwegia mempersoalkan mengenai batas perikanan Norwegia ini timbul karena Inggris menggugat sah-nya penetapan batas perikanan eksklusif yang ditetapkan oleh Norwegia dalam Firman Raja (*Royal Decree*) tahun 1935. Yang digugat oleh Inggris bukan lebar jalur laut wilayah Norwegia sebesar 4 mil, akan tetapi cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia. Di bulan Juli tahun 1935 Norwegia dengan menggunakan Firman Raja (*Royal Decree*) menetapkan batas-batas perairan perikanan Norwegia yang tertutup bagi nelayan asing. Firman Raja ini yang menunjuk pada Firman-Firman Raja yang serupa yang dikeluarkan di tahun 1812, 1869, 1881, dan 1889. Inggris tidak menyangkal hak-hak Norwegia untuk memiliki lebar laut teritorial 4 mil, namun menyatakan bahwa cara penarikan garis pangkal lurus sebagaimana ditetapkan dalam Firman Raja tahun 1935 bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Dari kutipan di atas jelas bahwa kedua belah pihak dalam sengketa tidak lagi mempersoalkan lebar laut 4 mil bagi Norwegia, demikian pula bahwa garis pangkal (*base-lines*) bisa ditarik dari tanah atau ketinggian yang minimal di permukaan air laut pada waktu pasang surut (*low tide elevations*).

⁹⁸ Zainal Kifli Abdul Razak, 'PERBANDINGAN DI ANTARA HUKUM SAINS DAN FALSAFAH KETUHANAN', *Gading Journal for Social Sciences (e-ISSN 2600-7568)*, 25.02 (2022), pp. 13-18.

⁹⁹ Rachel Ashcroft, "'On the Nature of Things": Lucretius' Secrets of the Universe', *TheCollector* <<https://www.thecollector.com/lucretius-on-the-nature-of-things-universe/>> [accessed 28 March 2025].

baik di bumi maupun di akhirat. Keadaan Tuhan yang berwujud perlu untuk digaris bawahi bahwa "Tuhan tidak akan pernah kehilangan kuasanya" sebab hakikatnya dari Tuhan yang *omnipotent*. Kemahakuasaan Tuhan yang tidak terbatas ini yang oleh Anselmus (1033-1109 SM) memberikan sebuah komentarnya "*credo ut intelegam, aliquid quo nihil maius cogtari possit*" yang berarti "aku beriman agar aku mengerti, Tuhan lebih besar dari pikiran". Tuhan dalam wujud representative yang tidak kehilangan kuasanya ini menjadi sebuah pengkajian terhadap filsafat ketuhanan yang diadopsi oleh para *teisme*. Jika sebelumnya wujud Tuhan dinyatakan dalam sebuah *representasi raja/dewa dewi* maka paham yang kedua yakni *interventionisme* dimana Tuhan menciptakan alam, membiarkan alam bergerak sendiri namun terkadang Tuhan ikut terlibat/campur tangan sehingga memunculkan sesuatu yang disebut keajaiban sedangkan paham ketiga yakni *okasionalisme* dimana Tuhan tidak pernah meninggalkan alam semesta, Tuhan hadir dalam segala tempat dan waktu (*omnipresent*).

Pemikiran yang berkembang dengan adanya *enigma* "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ini menciptakan kesan kehadiran Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan merupakan wujud nyata dari paham ketiga pada masa pencerahan tentang filsafat ketuhanan. Akan tetapi perlu untuk digaris bawahi bahwa kemahakuasaan Tuhan adalah absolut dimana Tuhan adalah sumber dari segala sumber yang ada (*being qua being*) yang digunakan oleh Aristoteles dalam *the books IV, VI and XI of the Metaphysics*.¹⁰⁰ Kebenaran terhadap putusan dari Tuhan adalah benar karena keniscayaannya bukan semata-mata kebenaran yang *inverted pyramid* (piramida terbalik) dimana jika putusan pada tingkatan pertama dinilai tidak adil, maka dapat ditempuh mekanisme pengadilan tingkat kedua dst. Inilah mengapa Alvin Plantinga (1970an) dengan mereparasi pemikiran Anselmus kemudian menjelaskan bahwa "jika sesuatu merupakan niscaya maka dia benar di seluruh dunia mungkin/kosmologi, sedangkan jika preposisi mungkin, maka dia benar di sebagian dunia mungkin/kosmologi".¹⁰¹ Kekuasaan Tuhan yang dikembangkan dalam pembuktian ontologis tentang keberadaan dari Tuhan dan dibuktikan dalam 5 (lima) jalan sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Lebih lanjut, keberadaan Tuhan di Pengadilan adalah absolut dimana Tuhan ada dan mengambil wujud sebagai "sesuatu" yang "telah ada" sebelum pengadilan tersebut "ada".

Keadaan tentang *realitas ultima* dari wujud Tuhan yang ada ini kemudian merujuk pada sebuah dialektika bahwa "*Tuhan ada di Pengadilan*" meskipun demikian, Tuhan tidak mengambil wujud sebagai seorang manusia yang diberikan gelar dan penyebutan secara khusus, Tuhan tidak menjadi para pihak yang merasa dirugikan, Tuhan juga bukan setiap benda dan makhluk hidup akan tetapi Tuhan dalam keadaan yang absolut, menampakan kehadirannya melalui udara di Pengadilan. Dengan demikian, maka kenyataan tentang Tuhan ada di pengadilan adalah benar namun Tuhan tidak menampilkan dirinya melalui seorang oknum ataupun gelar-gelar tertentu sehingga *enigma* yang digunakan pada sebuah putusan pengadilan dalam kajian ini dinilai sebagai sebuah *enigma* yang keliru dan tidak berdasar secara metaprosesual.

¹⁰⁰ 'The Subject Matter of Aristotle's Metaphysics. An Overview' <<https://www.ontology.co/being-qua-being.htm>> [accessed 28 March 2025].

¹⁰¹ Alvin Plantinga menggunakan logika modal yang bekerja dalam dua prinsip yakni sesuatu dikatakan mungkin jika sesuatu benar di dunia yang mungkin sedangkan sesuatu dikatakan niscaya apabila benar di seluruh dunia yang mungkin.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan benar ada di Pengadilan namun Ia tidak mengambil wujud sebagai seorang individu ataupun disematkan pada sebuah gelar-gelar tertentu yang dimuatkan dalam enigma putusan pengadilan yang bahkan tidak berkonsep secara metaprosesual, akan tetapi mengambil wujud sebagai sebuah zat absolut yang bersifat abadi dan senantiasa ada di Pengadilan yakni udara itu sendiri.

REFERENSI

- '4 Orang Yang Pernah Gugat Tuhan Di Pengadilan, Ada Yang Dinyatakan Menang | Halaman Lengkap' <<https://international.sindonews.com/read/1093347/45/4-orang-yang-pernah-gugat-tuhan-di-pengadilan-ada-yang-dinyatakan-menang-1683669921?showpage=all>> [accessed 26 March 2025]
- Abreu, Rogério Roberto Gonçalves de, Lúcio Grassi de Gouveia, and Virgínia Colares, 'Fatores metaprocessuais e suas influências para a formação da decisão judicial', *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, 8.2 (2018), pp. 661–87, doi:10.5102/rbpp.v8i2.5243
- ACHMAD MUZAKI, NIM 06520009, 'KONSEP TRIKAYA DALAM AGAMA BUDDHA MAHAYANA (Studi Tentang Ketuhanan)' (unpublished skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, 2013) <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10329/>>
- 'Arti Kata Meta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/meta>> [accessed 27 March 2025]
- 'Arti Kata Proses - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/proses>> [accessed 27 March 2025]
- Ashcroft, Rachel, "'On the Nature of Things": Lucretius' Secrets of the Universe', *TheCollector* <<https://www.thecollector.com/lucretius-on-the-nature-of-things-universe/>> [accessed 28 March 2025]
- awindusiwi, 'SANG HYANG WIDHI BRAHMAN YANG BERWUJUD DAN YANG TIDAK BERWUJUD', *Satyam Sivam Sundaram*, 5 November 2015 <<https://awindusiwi.wordpress.com/2015/11/06/sang-hyang-widhi-brahman-yang-berwujud-dan-yang-tidak-berwujud/>>
- 'Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah – PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR' <<https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>> [accessed 24 July 2023]
- Court, Federal, 'Civil Procedure & Federal Courts (Chambers v. God)' <<https://lawprofessors.typepad.com/civpro/2007/10/chambers-v-god.html>> [accessed 26 March 2025]
- Dahlan, Muhammad, 'Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.2 (2018), pp. 187–217, doi:10.22437/ujh.1.2.187-217
- 'David Ibn Shoshan on Spirit and Soul in: European Journal of Jewish Studies Volume 1 Issue 1 (2007)' <https://brill.com/view/journals/ejjs/1/1/article-p63_4.xml> [accessed 26 March 2025]
- ""DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"" SEBUAH JANJI HAKIM PADA SANG PENCIPTA - Opinion | University of Muhammadiyah Malang', <https://www.umm.ac.id/en/opini/demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa-sebuah-janji-hakim-pada-sang-pencipta.html> <<https://www.umm.ac.id/en/opini/demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa-sebuah-janji-hakim-pada-sang-pencipta.html>> [accessed 25 March 2025]
- 'Dialogues, Vol. 5 - Laws, Index to the Writings of Plato | Online Library of Liberty' <<https://oll.libertyfund.org/titles/plato-dialogues-vol-5-laws-index-to-the-writings-of-plato>> [accessed 27 March 2025]
- Fassbinder, J., H. Becker, and M. van Ess, 'Magnetometry at Uruk (Iraq): The City of King Gilgamesh', 2003, p. 9152
- 'Filipi 2:7 (Versi Paralel) - Tampilan Ayat - Alkitab SABDA' <<https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=filipi&chapter=2&verse=7>> [accessed 27 March 2025]
- 'Filsafat Agama / Trueblood, David', *DPK Kepri* <<https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/70d5g>> [accessed 27 March 2025]

- Foster, Dan, 'The Day Betty Penrose Sued God', *Backyard Church*, 27 July 2023 <<https://medium.com/backyard-theology/the-day-betty-penrose-sued-god-c376139e1cc6>>
- 'Freud's Theory of the Unconscious Mind: The Iceberg Analogy', 25 January 2024 <<https://www.simplypsychology.org/unconscious-mind.html>>
- 'Hakim : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama' <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/hakim-demi-keadilan-berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa>> [accessed 25 March 2025]
- 'Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Oleh: Ahmad Z. Anam (29/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama' <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-masih-wakil-tuhan-oleh-ahmad-z-anam-29-7>> [accessed 26 March 2025]
- Isakh Benyamin Manubulu, *506 Tahun Jejak Otonomi di Pulau Rote, Jilid 1. Tersesat dalam Pemahaman Nusak, Tangguh Denara Jaya (Tangguh Denara Jaya, 2023)* <<https://repository.tangguhdenarajaya.com/publications/563090/506-tahun-jejak-otonomi-di-pulau-rote-jilid-1-tersekat-dalam-pemahaman-nusak>>
- Jumhuri, Muh Asroruddin al, and Putri Marta Nitalia, 'Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9.1 (2024), pp. 105–10, doi:10.29303/jkh.v9i1.186
- Kesuma, Diani, 'Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara', *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 7.1 (2021), pp. 133–45, doi:10.35814/selisik.v7i1.2431
- Lambden, Stephen N., 'The Names of God and Theories of His Mightiest or Greatest Name (al-Isim al-A`zam) with Special Reference to the Miṣbāḥ (Luminary) of Tāqī al-Dīn Kaf`amī (d. 900/1494-5) and to Bābī-Bahāī Theologies of His Eschatological Name.' <<https://faculty.ucmerced.edu/slambden/abstracts/Names%20of%20God-Acuto.htm>> [accessed 27 March 2025]
- 'Lun Yu' <<https://khonghucu.tripod.com/kitab/lunyu.htm>> [accessed 25 March 2025]
- 'MAKNA KENOSIS DALAM FILIPI 2:7 - Jurnal Pelita Zaman - Alkitab SABDA' <<https://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=303&res=jpz>> [accessed 27 March 2025]
- Manubulu, Isakh, and others, *KONKRITISASI NILAI SOSIOLOGIS HUKUM ADAT SEBAGAI REALITAS SOSIAL DITINJAU DARI AWIG -AWIG DESA PAKRAMAN PADANGTEGAL*, 2018, doi:10.13140/RG.2.2.19780.45444
- Manubulu, Isakh Benyamin, *Pelebagaan Mahkamah Partai Politik di Indonesia (Pengantar Epiktolisme Hukum)*, 1st edn (Tangguh Denara Jaya, 2022)
- Manubulu, Isakh, and I Suyatna, *Archetypes Kewenangan: Sebuah Kajian Kritis Pemikiran I Nyoman Suyatna*, 2020, doi:10.13140/RG.2.2.10582.06725
- Manubulu, I. B., Tahu, M. F., Astariyani, N. L. G., Da Cruz, R., & Tuasikal, D. F. (2024). Exploring Student Perspectives on Restorative Justice: A Case Study at the Public High School of Kefamenanu. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 6(1), 25-52. <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.78039>
- Manubulu, I.B., et.al, "Political Concepts Expressed Through The Natural Semantic Metalanguage Approach" . (2024). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(01), 102-112. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.952>
- Manubulu, I., Kana, C., & Agustina, S. (2024). IDE BERPOLITIK DENGAN PENDEKATAN NATURAL SEMANTIC METALANGUAGE (NSM). *Jurnal Nawala Politika*, 2(2), 142 - 155. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/112279>
- Manubulu, I., & Sudibya, K. (2018). ANALISIS KONTEKSTUALITAS KOMUNIKASI POLITIK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, , 1-20. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/45964>
- Manubulu, I. B., Tona, H. I., & Bui, Y. A. (2023). Pergeseran Nilai Pada Tradisi Kumpul Keluarga dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Timor. *Journal of Education Sciences: Fondation & Application*, 2(2), 1–30. <https://doi.org/10.161985/jesfa.v2i2.61>
- Neonbeni, Randy Vallentino, and Isakh Benyamin Manubulu. *Bahan Ajar Hukum Laut Internasional*. 1st ed. Kupang: TANGGUH DENARA JAYA, 2023
- Manullang, E. Fernando M., 'PENAFSIRAN TELEOLOGIS/SOSIOLOGIS, PENAFSIRAN PURPOSIVE DAN AHARON BARAK: SUATU REFLEKSI KRITIS', *Veritas et Justitia*, 5.2 (2019), pp. 262–85, doi:10.25123/vej.v5i2.3495
- 'Memahami Ajaran Sanatana Dharma' <<https://kemenag.go.id/hindu/memahami-ajaran-sanatana-dharma-zj4887>> [accessed 25 March 2025]

- 'Mengapa Hakim Disebut Sebagai Wakil Tuhan? | Tempo.Co' <<https://www.tempo.co/hukum/mengapa-hakim-disebut-sebagai-wakil-tuhan--236808>> [accessed 26 March 2025]
- 'Merasa Hidupnya Sengsara, Pria Ini Gugat Tuhan Ke Pengadilan' <https://internasional.kompas.com/read/2016/05/08/16221421/Merasa.Hidupnya.Sengsara.Pria.Ini.Gugat.Tuhan.ke.Pengadilan?lgn_method=google&google_btn=onetap> [accessed 26 March 2025]
- Muhammad Adiguna Bimasakti, 'Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah – PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR' <<https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>> [accessed 25 July 2023]
- Mukalam, Mukalam, and Siti Murtiningsih, 'Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer sebagai Basis Ontologis Multikulturalisme', *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7.1 (2021), pp. 86–100, doi:10.30738/sosio.v7i1.9062
- 'Nebraska State Senator Ernie Chambers Sued God in State District Court', *The Blackacre Times*, 13 July 2011 <<https://theblackacretimes.com/2011/07/13/civ-pro-case-study-deities/>>
- Nggebu, Sostenis, 'Konsep Kenosis Yesus Kristus dalam Filipi 2:1-11 sebagai Norma Dasar Spiritualitas Kristen', *Integritas: Jurnal Teologi*, 5.1 (2023), pp. 1–17, doi:10.47628/ijt.v5i1.132
- Nugroho, Irham, 'Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11.2 (2016), pp. 167–77, doi:10.31603/cakrawala.v11i2.192
- on, Mike Bedard, 'Plato's Allegory of the Cave – Summary & Meaning Explained', 27 January 2025 <<https://www.studiobinder.com/blog/platos-allegory-of-the-cave/>>
- Pardosi, Milton Thorman, and Siti Murtiningsih, 'REFLEKSI KONSEP KETUHANAN AGAMA KRISTEN DAN AGAMA ISLAM DALAM PANDANGAN FILSAFAT PERENIAL', *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1.3 (2018), pp. 91–103, doi:10.23887/jfi.v1i3.16130
- PHILOTALK - Apa Itu Positivisme Logis?, dir. by Kanal Pengetahuan Fakultas Filsafat UGM, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=xd_zhPI9INw>
- 'PRINSIP HUKUM MENURUT PROF. LON LUVIS FULLER (GURU BESAR HARVARD)', *DETIK MAHASISWA HUKUM* <<https://www.detikmahasiswahukum.com/2020/05/prinsip-hukum-menurut-prof-lon-luvis.html>> [accessed 24 July 2023]
- Razak, Zainal Kifli Abdul, 'PERBANDINGAN DI ANTARA HUKUM SAINS DAN FALSAFAH KETUHANAN', *Gading Journal for Social Sciences (e-ISSN 2600-7568)*, 25.02 (2022), pp. 13–18
- Rishan, Idul, 'Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 18.1 (2021), pp. 001–21, doi:10.31078/jk1811
- Sebastian, Tanius, 'Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas', *Undang: Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), pp. 269–308, doi:10.22437/ujh.6.1.269-308
- Sisson, Jonathan, and others, 'There Is No Justice without Injustice' Three Propositions on the Right to Justice and Some Reflections on Dealing with the Past in the Balkans after the ICTY Gotovina and Haradinaj Verdicts, Acquittal of Gotovina and Haradinaj (Swisspeace, 2014), pp. 20–25 <<https://www.jstor.org/stable/resrep11065.8>>
- Suaidah, Indah, 'KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN', *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2025), pp. 48–55, doi:10.59638/ash.v11i1.1608
- Sukono, Djoko, 'Alkitab: Pernyataan Allah Yang Diilhamkan', *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15.1 (2019), pp. 28–34, doi:10.46494/psc.v15i1.66
- Syam, Fauzi, Sukamto Satoto, and Helmi Helmi, 'Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang', *Undang: Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), pp. 189–233, doi:10.22437/ujh.6.1.189-233
- 'The Subject Matter of Aristotle's Metaphysics. An Overview' <<https://www.ontology.co/being-qua-being.htm>> [accessed 28 March 2025]
- 'THERE IS NO JUSTICE | Office of Justice Programs' <<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/there-no-justice>> [accessed 27 March 2025]
- Tjahjadi, Simon Petrus L., *Petualangan Intelektual, Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern* (Kanisius, 2004) <www.kanisiusmedia.com>
- Vaughn, Alfred Marshall, 'GOD'S REPRESENTATIVE', *The Christian Science Journal*, 1 October 1952 <<https://journal.christianscience.com/issues/1952/10/70-10/god-s-representative>>
- Weekly, Lawyers, and Digital, 'Folklaw 18 November', 18 November 2005 <<https://www.lawyersweekly.com.au/sme-law/3765-folklaw-18-november>>
- WHO, *Global School Based Student Health Survey*, This Is the Second GSHS Conducted by Indonesia (World Health Organization, 2015), p. 2018 <<https://helpfulprofessor.com/injunctive-norms/>>

Wibisana, Andri G., 'Tangan Tuhan Di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kasus Lingkungan', *CELCA*, 14 November 2022 <<https://celcj.law.ui.ac.id/tangan-tuhan-di-pengadilan-dalih-bencana-alam-dan-pertanggungjawaban-perdata-dalam-kasus-lingkungan/>>
www.wisdomlib.org, 'Rig Veda 1.50.1 [English Translation]', 27 August 2021 <<https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/rig-veda-english-translation/d/doc829501.html>>